

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan secara terus menerus menjadi masalah yang dapat diidentifikasi di Indonesia. Bukti nyata kemiskinan dapat dilihat di tengah masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Kemiskinan didefinisikan sebagai tidak mempunyai individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan akses layanan sosial seperti kurangnya pemenuhan gizi, air, tempat tinggal yang tidak sehat, akses kesehatan yang buruk, serta tingkat pendidikan yang rendah (Hardana et al., 2024). Hal tersebut mengartikan bahwa kemiskinan terjadi karena pendapatan yang dimiliki tidak sebanding atau kurang dari pengeluaran untuk individu ataupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan bertolak belakang dengan kesejahteraan. Secara umum kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya persoalan ini akan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan yaitu sosial, ekonomi, politik, dan lainnya.

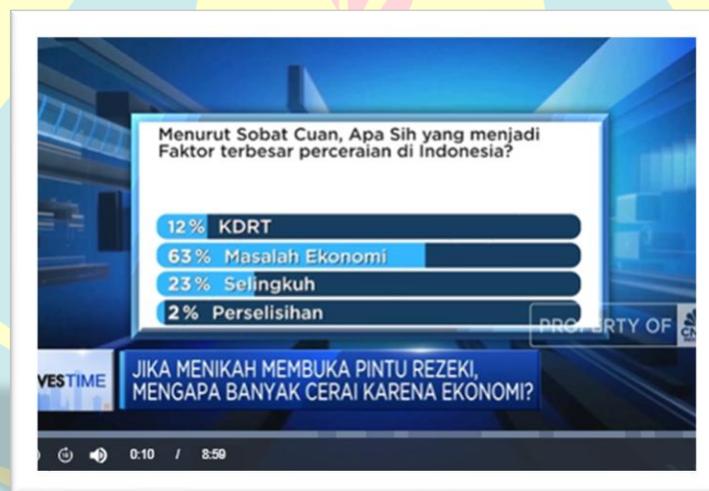
Diener & Tay, 2015 dalam Puspitawati et al. (2021) mengatakan kesejahteraan keluarga dapat diukur secara objektif dengan melihat faktor yang bersifat aktual dan secara subjektif berdasarkan kepuasan serta persepsi individu terhadap hidupnya. Hal ini berarti bahwa kesejahteraan objektif dapat diukur secara material, sementara kesejahteraan subjektif lebih menyoroti kepuasan individu terhadap berbagai aspek kehidupannya. Menurut Voukelatou et al. (2021) kesejahteraan dianggap sebagai indeks kemajuan untuk mengukur kesejahteraan secara keseluruhan; objektif dan kesejahteraan masyarakat, lalu disebutkan juga bahwa mendefinisikan kesejahteraan objektif selalu dianggap sebagai tugas yang menantang oleh karena itu seringkali para peneliti berfokus pada eksplorasi dimensinya daripada definisinya. Berbagai pandangan mengenai kesejahteraan keluarga namun secara garis besar kesejahteraan merupakan kondisi kompleks yang dapat berkontribusi pada kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Pada dasarnya, unsur-unsur yang bisa dianalisis dalam menilai kesejahteraan objektif

memiliki kesamaan, yaitu menilai kemampuan dari sisi material.. Dalam terciptanya kepuasan atau kebahagiaan diperlukan pemenuhan aspek yang bersifat objektif. Aspek ini memberikan gambaran konkret mengenai kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menciptakan stabilitas material. Secara teoritis kesejahteraan keluarga seharusnya dapat tercapai ketika penghasilan yang dimiliki dapat memenuhi kebutuhan tiap individu di dalam keluarga.

Akan tetapi, dalam realitasnya masih banyak keluarga yang menghadapi kesulitan finansial dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut laporan Liputan 6 (2025) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik, Kota Jakarta ditetapkan sebagai daerah yang memiliki biaya hidup terbesar atau termahal di Indonesia, yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus kegiatan bisnis di Indonesia, menjadi provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi. Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja, namun besaran kenaikan tersebut masih dinilai belum mampu mengimbangi kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran. Tingginya biaya hidup ini berdampak pada kesejahteraan keluarga, terutama bagi mereka yang tinggal di kota dengan biaya hidup yang tinggi namun berada dalam kategori ekonomi rendah, hal ini relevan dengan wilayah Jakarta Utara yang memiliki kawasan pesisir dengan resiko lebih besar dibanding wilayah lain seperti pengangguran, rumah tidak layak huni, dan rentan terhadap bencana alam yang mana dengan keadaan tersebut, biaya hidup yang tinggi dapat memperburuk kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan pada tahun 2023 di Jakarta Utara berada pada angka 684.557,00 perkapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 125,98 ribu atau 6,78 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penduduk berada tidak di atas garis kemiskinan atau di bawahnya dan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan keluarga.

Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Kesejahteraan sendiri dalam sisi objektif digambarkan sebagai tercukupinya segala kebutuhan melalui pendapatan yang dimiliki (Alatartseva & Barysheva, 2015). Dengan kata lain kesejahteraan objektif menekankan bahwa aspek ekonomi seperti pendapatan yang cukup menjadi faktor utama dalam

menentukan tingkat kesejahteraan seseorang. Suradi 2016 dalam Unayah (2017) mengatakan bahwa jika pendapatan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, kesejahteraan objektif sulit tercapai akibatnya kemiskinan tetap menjadi “ibu” yang melahirkan berbagai masalah sosial dan menghambat peningkatan kualitas hidup. Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa tidak sedikit keluarga menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesejahteraan ini. Seperti yang dilansir melalui TV One News (2024) Badan Pusat Statistika mencatat angka perceraian di tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2021, tingginya angka perceraian didominasi faktor perselisihan yang disusul masalah finansial.



Gambar 1.1 Faktor Terbesar Perceraian di Indonesia Menurut Masyarakat

Diperkuat dengan hasil suara masyarakat yang terkumpul melalui Financial Expert CNBC Indonesia (2024) pada gambar 1.1 yang menunjukkan hasil suara terbanyak diperoleh karena faktor masalah ekonomi dan disusul dengan faktor selingkuh, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan perselisihan. Tingginya angka perceraian akibat permasalahan ekonomi ini memberi indikasi bahwa stabilitas finansial mempunyai andil yang begitu besar terhadap peningkatan kesejahteraan dalam rumah tangga. Pendapatan yang tidak mencukupi, ditambah dengan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan, dapat meningkatkan risiko konflik dalam keluarga. Masalah sosial tersebut masih mencerminkan rendahnya kesejahteraan keluarga akibat faktor ekonomi.

Untuk mengatasinya, terdapat program pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi permasalahan kesejahteraan Rumah Susun Sederhana Sewa atau umumnya disebut Rusunawa. Pemerintah membangun

Rusunawa sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya mereka yang berpenghasilan di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) atau MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), korban bencana, dan terdampak penataan kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat atau ketua RW (Rukun Warga) beserta staf nya, Rusunawa Penjaringan ini mulanya dibangun untuk menampung korban kebakaran yang tinggal di wilayah Penjaringan akibat kepadatan penduduk serta warga tinggal di kolong tol dan tergusur pemerintah. Seiring berjalannya waktu, bangunan lama mengalami kerusakan dan sudah tidak layak huni, sehingga dilakukan pembangunan ulang menjadi Rusunawa yang lebih baik seperti saat ini. Terdapat sekitar 1.600 kepala keluarga (KK) yang menghuni, biaya sewa diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sewa dengan subsidi bagi warga yang terdampak musibah sebesar Rp550.000,00 dan non subsidi atau umum bagi warga yang berpenghasilan kecil sebesar Rp865.000,00 - Rp1.300.000,00/bulan, menyesuaikan tingkat pendapatan mereka. Namun, keduanya tetap harus memenuhi salah satu syarat utama untuk menghuni Rusunawa yaitu memiliki penghasilan di bawah UMP.

Mayoritas penghuni Rusunawa bekerja sebagai pedagang kecil, buruh harian lepas seperti tukang cuci gosok, pemulung, atau pengemudi ojek online. Banyak dari mereka yang berjualan di luar wilayah Rusunawa Penjaringan yang rentan terhadap banjir karena padat penduduk dan lokasinya yang dekat dengan perairan, sehingga ketika terjadi banjir aktivitas perdagangan maupun pekerjaan lainnya terganggu, yang berdampak pada ketidakstabilan pendapatan mereka. Beberapa warga yang menghuni di Rusunawa Penjaringan mengalami perubahan dalam kondisi ekonomi seperti pensiun, kehilangan pekerjaan, atau menjadi orang tua tunggal. Situasi ini juga menyebabkan pergeseran peran dalam keluarga, di mana dalam beberapa kasus, ibu atau anak menjadi pencari nafkah utama menggantikan peran ayah. Berdasarkan keterangan RW dan staf, rentang pendapatan warga di Rusunawa Penjaringan berkisar Rp3.000.000,00 - Rp4.000.000,00/bulan, angka yang masih berada di bawah kebutuhan hidup layak di Jakarta. Seringkali penghasilan yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan dasar, sehingga banyak masyarakat menghadapi kesulitan dalam mencukupi keperluan harian mereka.

Selain tantangan ekonomi, berdasarkan hasil wawancara Rusunawa Penjaringan juga memiliki tingkat kriminalitas tertinggi dibandingkan dengan Rusunawa lainnya di Jakarta. Hal ini diperkuat oleh penelitian Basthian (2021) yang menyebutkan bahwa tingginya tingkat kriminalitas di Rusunawa Penjaringan mengindikasikan rendahnya kesejahteraan. Terlebih Rusunawa Penjaringan merupakan bagian dari Jakarta Utara yang merupakan zona merah dengan angka kriminalitas tinggi sebanyak 1.975 kasus berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019). Faktor lain yang turut memengaruhi kesejahteraan di Rusunawa adalah keberadaan organisasi sosial atau kelompok masyarakat yang dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Hingga saat ini, terdapat Karang Taruna dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) sebagai kelompok masyarakat yang dapat diikuti oleh penghuni Rusunawa Penjaringan. Meskipun PKK dan Karang Taruna tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan objektif, keberadaannya dapat menghubungkan antar individu, memperkuat hubungan sosial di antara warga, membangun solidaritas, serta menjadi wadah bagi berbagai kegiatan yang berkontribusi pada kesejahteraan secara tidak langsung. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, hubungan sosial yang kuat memungkinkan warga untuk mengakses bantuan, baik dalam bentuk dukungan material maupun moral.

Hal utama yang dibutuhkan warga Rusunawa untuk keberlangsungan hidup berdasarkan keterangan RW adalah kebutuhan konsumsi karena biaya sewa sudah menjadi kesepakatan dan menjadi salah satu syarat awal dalam menggunakan unit Rusunawa namun ketidakstabilan ekonomi membuat warga tetap menjadikan hal tersebut beban dan memengaruhi kemampuan penghuni Rusunawa untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam aspek objektif karena terbatasnya penghasilan yang diperoleh tidak memenuhi pengeluaran, sehingga banyak warga kesulitan mencukupi kebutuhan dasar. Keluarga merupakan kelompok terkecil yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai kontribusi penting dalam menciptakan kesejahteraan (Musyarofah, 2021). Dalam pemenuhan kebutuhan keluarga adakalanya dihadapkan dinamika kehidupan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan, seperti pergeseran peran dan struktur dalam keluarga yang mengharuskan tiap keluarga dapat beradaptasi dengan

kondisi tersebut. Kerja sama yang baik antara individu, baik dalam keluarga maupun dalam lingkup sosial, dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kesejahteraan. Kapabilitas tersebut disebut dengan modal sosial.

Dalam pembahasan kesejahteraan keluarga, modal sosial termasuk bagian dari faktor yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup. Menurut Kaur et al. (2019) modal sosial mengacu pada koneksi atau hubungan yang dibangun dan dikembangkan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan, yang menyoroti modal sosial sebagai kapabilitas individu untuk mendukung kebutuhan hidup. Peningkatan jumlah modal sosial akan meningkatkan jumlah peluang usaha yang diikuti dengan peningkatan dalam menyerap tenaga kerja dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan sosial (Amin, 2024). Dengan kata lain, individu atau kelompok dengan modal sosial yang kuat cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan adanya jaringan dan hubungan yang baik, masyarakat dapat saling mendukung dalam menciptakan usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup.

Pada penelitian ini adapun beberapa penelitian relevan terkait modal sosial dan kesejahteraan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sidiq et al. (2021) dengan judul “Modal sosial dan kesejahteraan masyarakat daerah aliran sungai di Kabupaten Kampar” diketahui sebesar 53,5% pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat daerah aliran sungai di Desa Buluh Cina. Modal sosial dalam penelitian ini berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian peneliti menyarankan perlunya kepedulian masyarakat untuk membentuk kelompok dan meningkatkan kegiatan sosialisasi guna menghidupkan kembali kegiatan sosial yang memungkinkan untuk kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Kedua, penelitian yang dilakukan Darmawan dan Barlan (2022) dengan judul “Analisis hubungan modal sosial dengan kesejahteraan anggota kelompok pedagang di Kawasan Wisata Pantai Widuri” menunjukkan bahwa modal sosial yang mencakup jaringan sosial, norma, dan kepercayaan berhubungan dengan kesejahteraan objektif yang diukur melalui tingkat pendapatan, konsumsi, akses pendidikan, kesehatan, dan kondisi tempat tinggal. Penelitiannya memuat informasi yakni terdapat hubungan antara modal sosial kesejahteraan. Kemudian peneliti menuliskan tingkat kesejahteraan yang tinggi karena berpegang pada bekal

yang dimiliki pedagang yaitu modal sosial. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan yang ada di pedesaan, sehingga belum mengungkap seberapa besar pengaruh modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di perkotaan khususnya pada wilayah padat penduduk dengan biaya hidup yang tinggi serta masih banyaknya pekerjaan dengan penghasilan yang tidak stabil. Mengingat bahwa modal sosial dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Dengan melihat adanya hubungan antara modal sosial dan kesejahteraan objektif serta masih banyaknya permasalahan keluarga di Rusunawa Penjaringan, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Objektif Keluarga di Rusunawa Penjaringan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, maka dilakukan identifikasi masalah untuk melihat garis besar permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Pendapatan yang tidak stabil, tingginya biaya hidup, serta terbatasnya pendapatan keluarga di Rusunawa Penjaringan menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar tidak terpenuhi.
2. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengukur sejauh mana peran organisasi atau kelompok masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan.
3. Tingginya frekuensi kriminalitas seperti pencurian yang mengindikasikan rendahnya tingkat kesejahteraan.

1.3 Batasan Masalah

Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan objektif keluarga di Rusunawa Penjaringan dengan responden keluarga yang menghuni di Rusunawa Penjaringan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan keterbatasan permasalahan yang telah disebutkan maka penelitian ini dirumuskan “Apakah terdapat pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan objektif keluarga di Rusunawa Penjaringan?”.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan baik dari segi teori maupun hasil penelitian terkait modal sosial terhadap kesejahteraan objektif.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan dasar untuk proyek penelitian masa depan yang akan melihat aspek-aspek lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman ilmiah dan kemampuan berpikir kritis tentang bagaimana modal sosial mempengaruhi peningkatan kesejahteraan keluarga di lingkungan Rusunawa Penjaringan.

b. Bagi Pengelola Rusunawa

Dapat menjadi pertimbangan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi warga, seperti menyediakan ruang bersama atau fasilitas kegiatan warga. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, modal sosial antarwarga dapat tumbuh lebih optimal.

c. Bagi Pemangku Kebijakan

Dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai landasan untuk mengembangkan strategi dalam memaksimalkan program sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Intelligentia - Dignitas